

Supersemar: Sejarah dalam Balutan Kekuasaan

Bagian Pertama dari Dua Tulisan

Oleh: Hendra Kurniawan

LAHIRNYA Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar atau SP 11 Maret) 1966 diawali oleh peristiwa keji tanggal 1 Oktober 1965 dini hari yang menewaskan enam orang perwira tinggi dan satu perwira menengah TNI AD. Kekejangan ini kemudian disusul oleh banjir darah dalam pembantaian massal yang berlangsung antara medio bulan Oktober hingga Desember 1965. Bahkan berdasarkan analisis Robert Cribb, pelenyapan nyawa para pengikut maupun orang yang dituduh sebagai simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) ini mencapai angka terendah 78.000 hingga terbanyak 2.000.000 jiwa.

Gerakan 30 September 1965 berhasil diatasi oleh Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Mayjen Soeharto. Kesigapan dalam mengatasi keadaan sejak 1 Oktober 1965 membuat Mayjen Soeharto diserahi tugas sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib). Karier militernya menanjak cepat, Soeharto kemudian dilantik sebagai Panglima TNI AD dengan pangkat Letjen.

Hari Jumat tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno tengah memimpin Sidang Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan di Istana Merdeka. Tiba-tiba tersiar kabar bahwa selain demo mahasiswa, ternyata ada sekelompok pasukan tak dikenal tanpa atribut yang sedang bergerak di sekitar Monas. Melihat situasi demikian maka Presiden Soekarno segera meninggalkan sidang dan terbang menggunakan helikopter menuju ke Istana Bogor. Sore harinya datanglah tiga orang jenderal yang sebelumnya telah bertemu dengan Letjen Soeharto yang tidak

hadir dalam sidang kabinet karena sakit.

Di Istana Bogor, ketiga jenderal yaitu Basuki Rachmat, Amir Machmud, dan M. Jusuf berhasil meyakinkan Presiden Soekarno untuk mengeluarkan suatu surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengamankan situasi yang semakin memanas. Usai surat itu ditandatangani dan kemudian diterima oleh Letjen Soeharto, jalan politik Indonesia berubah drastis. Tidak sampai 24 jam setelah ditandatanganinya surat tersebut, Soeharto langsung membubarkan PKI dan kemudian menangkap 15 orang menteri dan menyingkirkan orang-orang yang pro-Soekarno dari lingkaran kekuasaan.

Supersemar menandai perubahan besar pada orientasi berbagai kebijakan politik di Indonesia. Sejak inilah secara perlahan namun pasti kekuasaan Soekarno mulai dipreteli. Kebijakan-kebijakan politik yang sifatnya non teknis militer yang semestinya menjadi wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan sejak itu dapat diambil oleh Soeharto selaku Panglima AD/Pangkopkamtib atas dasar Supersemar. Khawatir jika Supersemar dapat dicabut oleh Presiden Soekarno sewaktu-waktu, maka MPRS yang telah diisi oleh para pendukung Soeharto segera mengesahkan Supersemar menjadi Ketetapan MPRS pada tahun 1967.

Meskipun secara fisik surat aslinya tidak pernah ditemukan sehingga muncul banyak kontroversi, namun keberadaan Supersemar tidak dapat dipungkiri. Presiden Soekarno dalam pidatonya yang berjudul *Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah (Jasmerah)* tanggal 17 Agustus 1966 dengan tegas menyatakan bahwa Super-

semar yang diberikannya pada Letjen Soeharto bertujuan untuk mengatasi keadaan dan menjaga wibawa keadilan. Dalam pidato tersebut Presiden Soekarno juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada Letjen Soeharto karena telah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun Soekarno sebagai pemberi perintah juga menekankan bahwa SP 11 Maret bukanlah peralihan kekuasaan (*transfer of authority*).

Apabila Supersemar dianggap sebagai perintah peralihan kekuasaan dan pelimpahan wewenang pemerintahan dari Soekarno kepada Soeharto tentu suatu kekeliruan. Supersemar tidak tepat dijadikan legitimasi bagi pengambilan keputusan politis yang dilakukan oleh Soeharto, apalagi dianggap dijadikan tonggak bagi berdirinya pemerintahan Orde Baru. Akan tetapi terbukti bahwa Supersemar telah menjadi titik balik kekuasaan Presiden Soekarno yang kala itu terus merosot, terbalik dengan makin populernya nama Letjen Soeharto. Arah perpolitikan Indonesia berbelok dari sipil ke militer, dari berorientasi kiri menjadi ke kanan, dan dari anti nekolim menjadi pro modal asing. Supersemar kemudian menjadi alat politik bagi legitimasi kekuasaan yang bercokol selama 32 tahun.

Sejarah dan kepentingan politik

Selama ini, sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah adalah versi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dilindungi oleh aparat keamanan. Pembelajaran sejarah di sekolah berangkat dari kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dengan sumber belajar buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) maupun buku-buku babon lain yang telah

lulus sensor dari penguasa. Pembelajaran sejarah yang tidak sesuai dengan pakem resmi pemerintah dianggap berbahaya yang dapat mengancam keutuhan bangsa.

Bergulirnya reformasi menyebabkan demokrasi dan kebebasan tidak dapat dibendung lagi. Berbagai informasi dan wacana baru mengenai sejarah nasional bukan lagi hal yang tabu dibicarakan. Salah satunya yaitu kemunculan berbagai versi dan analisis mengenai Supersemar. Barangkali entah karena sikap kehati-hatian atau memang masih ada kepentingan politik tertentu, pemerintah saat ini tetap memiliki peran menentukan wacana yang menurutnya tepat terkait dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang mengandung kontroversi. Ini dapat dikatakan sebagai suatu kemunduran dari semangat reformasi.

Para guru atau pengajar sejarah tentu sangat ingat dengan tahun 1998 sampai 1990-an, di samping mata pelajaran sejarah, di sekolah-sekolah juga diajarkan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Kebijakan ini jelas sangat sarat dengan unsur politik. Gagasan mengenai PSPB datang dari Sejarahwan Orde Baru, Nugroho Notosusanto yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Landasan hukum PSPB yaitu Tap MPR Nomor II/MPR/1983 yang berbeda dengan mata pelajarannya yang hanya berdasarkan keputusan menteri. PSPB menjadi mata pelajaran yang berkedudukan istimewa.

PSPB mengambil materi pelajaran sejarah pada tema-tema tertentu yang dianggap dapat menanamkan semangat juang dan patriotisme peserta didik. ***

Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Supersemar: Sejarah dalam Balutan Kekuasaan

Bagian terakhir
dari dua tulisan

Oleh: Hendra Kurniawan

DALAM konteks inilah maka sejarah sebagai ilmu telah kehilangan objektivitasnya dan dijadikan alat untuk doktrinasi kebangsaan versi pemerintah Orde Baru. Semangat dan cita-cita Orde Baru harus didukung dan semua upaya yang dianggap mengancam stabilitas negara (pemerintah) harus dihabisi. Dalam Kurikulum 1994 memang PSPB sudah tidak diajarkan lagi, namun mata pelajaran sejarah tetap menekankan pada aspek militer dan kepentingan penguasa belaka.

Anggapan bahwa sejarah secara

konseptual didominasi oleh sejarah militer dan politik, kehidupan para tokoh penguasa, perang, pemberontakan, dan perluasan kekuasaan perlu diubah. Sejarah merupakan ilmu yang berbicara mengenai masyarakat dan bukan hanya menjadi alat penguasa. Sejarah kritis tidak hanya memperhatikan peristiwa-peristiwa politik dalam kehidupan berbangsa, namun juga aspek ekonomi, sosial, budaya, dan religius dalam perkembangan suatu bangsa. Paradigma semacam ini penting agar sejarah tidak mudah jatuh dan terseret arus kekuasaan.

Demikian halnya dengan sejarah mengenai Supersemar yang selama ini dibalut oleh kepentingan penguasa perlu dikembalikan pada relnya. Perlu ditelaah lebih lanjut apakah benar Supersemar memiliki legitimasi bagi tonggak suatu pemerintahan baru. Penyimpangan atau penafsiran yang terlalu jauh atas perintah Supersemar juga perlu dicermati ada apa di balik itu semua terkait dengan upaya penggulingan pemerintahan yang sah. Demikian pula dengan dugaan keterlibatan pihak asing, terutama Amerika Serikat yang dalam konteks Perang Dingin saat

itu mendukung terjadinya peralihan kekuasaan di Indonesia.

Pada akhirnya memang kita perlu mengambil jarak dengan berbagai kontroversi yang muncul dalam sejarah agar lebih objektif dalam mencari akar permasalahan serta solusi yang bijak bagi kehidupan bangsa ke depan. Inilah yang sesungguhnya jauh lebih penting yaitu menanamkan kesadaran sejarah sekaligus memaknai suatu peristiwa sejarah agar generasi muda dapat lebih arif bijaksana dalam menghadapi persoalan bangsanya. ***

Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.